

JEJAK LANGKAH PERUBAHAN

dari Using sampai Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

JEJAK LANGKAH PERUBAHAN

dari Using sampai Indonesia

Editor:

Novi Anoegrajkti



PENERBIT OMBAK
www.penerbitombak.com

2016

**JEJAK LANGKAH PERUBAHAN
DARI USING SAMPAI INDONESIA**

Copyright©Pusat Penelitian Budaya Etnik dan Komunitas,
Lembaga Penelitian Universitas Jember, Agustus 2016

Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Budaya Etnik dan Komunitas,
Lembaga Penelitian Universitas Jember
bekerjasama dengan Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia dan
Penerbit Ombak (**Anggota IKAPI**), 2016
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55599
Tlp. 085105019945; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id
facebook: Penerbit Ombak Dua
www.penerbitombak.com

PO.690.07.'16

Editor:

Novi Anoegrajekti

Tata letak: Ridwan
Sampul: Dian Qamajaya

Gambar Sampul
www.google.com.sg

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

**JEJAK LANGKAH PERUBAHAN
DARI USING SAMPAI INDONESIA**

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016
xvi + 416 hlm.; 16 x 24 cm
ISBN: 978-602-258-381-3

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor

Ruang Negosiasi Tradisional dan Inovasional ~ vii

Kata Pengantar Ketua HISKI Pusat

Metamorfosis Bahasa, Sastra, dan Budaya ~ x

Kata Pengantar Rektor Universitas Jember

Sastra: Jejak-jejak dan Perubahannya ~ xiv

BAGIAN PERTAMA: BAHASA MEMBANGUN MANUSIA

1. Lirik Tembang Jamu: Antara Pengenalan dan Romantisme
 - Sudartomo Macaryus ~ 1
2. Model-Model Strategi Kesantunan Berbahasa dalam Kultur Jawa
 - M. Rus Andianto ~ 16
3. Mengenalkan Bahasa Daerah Sejak Dini kepada Anak
 - Anastasia Erna Rochiyati Sudarmaningtyas ~ 46
4. Masa Depan Bahasa Madura di Kabupaten Jember: Sebuah Ancaman di Depan Mata
 - Hairus Salikin ~ 55

BAGIAN KEDUA: SASTRA DAN KESADARAN SOSIAL

1. Perubahan Sosial Berbasis Lintas Budaya: Identitas dan Ruang Negosiasi Global-Lokal
 - Novi Anoeagrajekti ~ 68
2. Nasionalisme *Fashion*: Ekspresi Identitas Pascakolonial dalam Novel Trilogi *Ronggeng Dukuh Puruk* Karya Ahmad Tohari
 - Abu Bakar Ramadhan Muhamad ~ 84
3. Memahami Sosok Perempuan: *Parasit Lajang*, *Cerita Cinta Enrico*, dan *Pengakuan Eks Parasit Lajang*
 - Endang Sri Widayati ~ 103
4. Sastra Daerah Cermin Penanaman Pendidikan Perilaku Berkarakter
 - Muji ~ 119
5. Interpretasi Tanda-tanda Realitas Sosial dalam Puisi “Marto Klungsu dari Leiden” Karya Darmanto Jatman: Sebuah Tinjauan Semiotik Sastra
 - Sunarti Mustamar ~ 128
6. Teks *Swargarohanaparwa* sebagai Model Perilaku Moralitas dalam Kehidupan Manusia
 - Asri Sundari ~ 149
7. Representasi Perempuan dalam Novel *Perempuan Berkalung Sorban* Karya Abidah El-Khalieqy dan *Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan* Karya Ihsan Abdul Qudus: Kajian Stilistika
 - Ahmad Faizi ~ 158

8. Sastra Harjendranu dan Ajaran Kesempurnaan Resi Wisrawa Kepada Dewi Sukeksi: Suatu Rekonstruksi Konsep Etika Nusantara dalam *Serat Lokapala*
 - Eko Suwargono ~ 180
9. Urgensi Sastra Berbasis Kearifan Lokal dalam Pembangunan Moral Bangsa: Kajian Sosiologi Sastra
 - Ali Imron Al-Ma'ruf ~ 204

BAGIAN KETIGA: BAHASA DAN SASTRA MEDIA EDUKASI

1. Pemanfaatan Nilai Edukasi Lagu Daerah di Indonesia dalam Pembangunan Karakter Bangsa
 - Anita Widjajanti ~ 220
2. Pengembangan Media Pembelajaran Demokratis Kooperatif dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara melalui Strategi Kooperatif *Think Pairs Share*
 - Arief Rijadi dan Parto ~ 232
3. Memelihara Keberdayaan Teks Dongeng melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia Berpendekatan *Whole Language*
 - Arju Muti'ah ~ 250
4. Model Pendidikan Pesantren dalam Novel *Santri Cengkir* Karya Abidah El-Khalieq
 - Furoidatul Husniah ~ 265
5. Strategi Kontestasi Jender dalam Sastra Anak Indonesia dan Sastra Anak Terjemahan: Pola Resistensi Tokoh Perempuan di Bawah Hegemoni Kultur Patriarki
 - Supiastutik dan Dina Dyah Kusumayanti ~ 275

BAGIAN KEEMPAT: BUDAYA VERBAL DAN NONVERBAL

1. *Welas Asih*: Merefleksi Tradisi Sakral, Memproyeksi Budaya Profan
 - Heru S.P. Saputra ~ 288
2. Membincang Kembali Diskursus Bangsa dalam Novel Indonesia: Dari Etnolokalitas sampai dengan Pascanasional-Pasca-Indonesia
 - Akhmad Taufiq ~ 314
3. Revitalisasi Budaya Seni dan Sastra Cina Pasca-Orde Baru
 - Retno Winarni, Bambang Samsu Badriyanto, dan Sri Ana Handayani ~ 338
4. Mitos "Duplang Kamal-Pandak" di Lembah Gunung Argapura Jawa Timur
 - Sukatman ~ 359
5. Percumbuan antara *Danyang Buyut Cili* dengan *Barong Tuwa dalam Ritual Ider Bumi* di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi
 - Latifatul Izzah ~ 376
6. Proses Penciptaan Film Dokumenter *Java Teak*: Kontribusi Kayu Jati bagi Masyarakat Jawa
 - Muhammad Zamroni ~ 392

INDEKS ~ 410

PERUBAHAN SOSIAL BERBASIS LINTAS BUDAYA: Identitas dan Ruang Negosiasi Global-Lokal¹

Novi Anoegrajekti

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
novianoegrajekti.sastra@unej.ac.id

A. Pendahuluan

Pada tahun 1945, menjelang diumumkannya Undang-Undang Dasar Negara, terjadi perdebatan seru soal kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional; kebudayaan daerah sebagai kenyataan konkret-historis dan kebudayaan nasional sebagai sesuatu yang akan dibentuk (masih dibayangkan). Kenyataan peliknya hubungan kebudayaan daerah (lokal) dengan kebudayaan nasional di satu sisi dan soal kebudayaan nasional itu sendiri di sisi yang lain tampaknya masih berlanjut hingga sekarang. Di sisi lain, arus pertukaran membuat interaksi antarbudaya menjadi suatu keniscayaan.

Multikulturalisme² di Indonesia yang merebak di akhir tahun 1990-an sebagai respons terhadap penyeragaman budaya sejak Orde Baru, mampu bergerak menuju keragaman. Nyaris tak ada wilayah budaya yang terisolasi dari yang lain dan tidak dilalui lintas budaya global. Istilah ini muncul selain sebagai penghargaan atas kebudayaan lain, tetapi juga mencakup permasalahan

¹ Tulisan ini merupakan pengembangan dari Makalah "Pendidikan Berbasis Lintas Budaya: Identitas dan Ruang Negosiasi Global-Lokal yang saya presentasikan Pada Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan di Era Global di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, 7– 8 Mei 2012.

² Multikulturalisme adalah kebudayaan yang beranekaragam dan sederajat. Kebudayaan dianggap sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia yang dipakai untuk memahami dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya, bagi pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk itu, kebudayaan sebagai pedoman hidup yang dinamik yang dimiliki manusia dengan kecairannya untuk berubah, berkembang, dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Selanjutnya lihat Parsudi Suparlan, "Multikulturalisme sebagai Modal Dasar Bagi Aktualisasi Kesejahteraan Rakyat Indonesia," dalam *Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural*, (Jakarta: YPKIK, 2008).

produk-produk budaya sebagaimana yang muncul dalam politik, hukum, ekonomi dan sosial. Multikulturalisme menekankan pentingnya mengakui dan menghargai keragaman budaya, mengubah kebijakan publik untuk mengakomodasi keragaman untuk menciptakan masyarakat heterogen yang damai dan adil. Pentingnya bersikap kritis terhadap isu multikultural ini untuk menyikapi bahwa kebijakan dan wacana multikultural di berbagai negara seringkali terlalu menekankan perbedaan daripada persamaan dan sangat rentan digunakan untuk memperuncing politik identitas (Melani, 2005:29).

Terdapat 3 pandangan mendasar multikultural menurut Biku Parekh yang sering disalahpahami. *Pertama*, manusia hidup dan tumbuh dalam sebuah dunia yang telah terstruktur secara kultural dan menjalankan kehidupan dan relasi-relasi sosialnya dalam kerangka sistem pemaknaan yang diturunkan secara kultural. Dalam hal ini bukan berarti bahwa manusia sepenuhnya dideterminasi oleh kebudayaannya, dalam pengertian tidak bisa tumbuh di atas kategori pemikirannya dan secara kritis mengevaluasi nilai-nilai maknanya. Melainkan mereka memang dibentuk dalam kebudayaan yang telah mereka warisi dan secara reflektif dapat diperbarui. *Kedua*, budaya yang berbeda merepresentasikan sistem makna dan visi yang berbeda. Hal ini menunjukkan keterbatasan kapasitas manusia dalam menangkap sebagian dari totalitas manusia. Ia membutuhkan budaya-budaya lain untuk mengembangkan diri dalam cakrawala intelektual dan menjaga dari godaan mengabsolutkan diri. *Ketiga*, setiap budaya secara internal bersifat plural, cair, dan terbuka. Setiap budaya bersifat multikultural asal-usul dan pembentukannya, serta membawa bagian-bagian dari budaya lain dan tidak pernah benar-benar *sui genesis* (Budiman, 2005:4).

Dalam kaitannya dengan kajian sastra dan budaya, problem klaim keaslian identitas etnis atau ras memunculkan beberapa kajian poskolonial yang mengacu pada permasalahan bahasa, sejarah, nasionalisme, kanonitas, politik tubuh, dan hibriditas, serta menekankan interaksi lintas budaya yang dinamis. Dalam konteks penjajahan, interaksi budaya penjajah dan masyarakat terjajah menghasilkan bentuk budaya yang hibrid. Masyarakat terjajah bukan hanya kerjanya telah dirampas, tetapi juga mereka yang dalam jiwanya telah diciptakan kompleks inferioritas yang diakibatkan oleh kematian dan penguburan orisinalitas budaya lokal mereka (Loomba, 1998:31).

Strategi hibriditas³ dapat melalui mimikri.⁴ Bhabha menggulirkan istilah mimikri, yakni upaya meniru budaya penjajah yang bersifat ambivalen karena selalu mirip tetapi tidak persis sama (1994:86). Peniruan sebagai interaksi dari berbagai bentuk kultural yang berlainan. Terdapat enam cara pertemuan budaya: 1) dua tradisi budaya yang berlainan dibiarkan tetap terpisah dalam konteks waktu dan ruang; 2) dua tradisi budaya yang terpisah dipertemukan dalam ruang dan waktu; 3) kebudayaan bersifat translokal dan melibatkan aliran global. Hibridisasi terjadi di luar pengenalan akan perbedaan dan memproduksi sesuatu yang baru; 4) tradisi budaya berkembang di tempat terpisah, namun mengembangkan identifikasi yang didasarkan atas persepsi tentang kemiripan dan kesamaan tradisi dan situasi; 5) suatu tradisi budaya menyerap atau menghapus tradisi lain dan menciptakan kemiripan yang efektif; dan 6) bentuk-bentuk baru identitas yang dibentuk dari kepedulian bersama terhadap poros kelas, etnisitas, jender, dan umur. Hal ini adalah pandangan antiesensialis dimana kemiripan dibangun secara strategis (Barker, 2004:209).

Identitas kultural selalu dikaitkan dengan hibriditas dan diaspora. Menurut Hall (1993; Melani, 2005:38) identitas bukanlah esensi, melainkan sejumlah atribut identifikasi yang memperlihatkan bagaimana kita diposisikan dan memosisikan diri dalam masyarakat, karena aspek budaya dan kesejarahan merupakan keniscayaan. Hall menekankan bahwa identitas sebagai suatu produksi yang tidak pernah tuntas, selalu dalam proses dan selalu dibangun dalam representasi. Identitas tidak bersifat statis, selalu dikonstruksikan dalam ruang dan waktu, serta bersifat kompleks dan majemuk. Sedangkan Kahn (1995) menyatakan konstruksi identitas budaya bersifat kompleks, antara lain karena

³ Hibridisasi dibedakan atas 2 jenis. *Pertama*, hibridisasi struktural merujuk pada berbagai lokus hibriditasnya. *Kedua*, hibridisasi kultural membedakan antara pilihan yang dibuat oleh kelompok-kelompok diaspora (kelompok yang berpindah karena faktor politis, ekonomi, dan sosial) antara pembalikan pada budaya lamanya atau pengalihan pada budaya baru. Selanjutnya lihat Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (ed), *Cultural Studies: Tantangan Bagi Teori-teori Besar Kebudayaan*, (Depok: Koekoesan, 2007), hlm. 140-141.

⁴ Hibriditas yang ditempuh dengan cara mimikri merupakan peniruan yang kabur (*blurred copy*) dari apa yang ditiru, karena kaum terjajah tidak pernah memproduksi secara tepat kebiasaan, nilai-nilai, dan institusi yang mereka peroleh dari Barat. Tindakan mimikri juga merupakan bentuk resistensi dari dalam, potensi subversif yang ditempatkan dalam wilayah antara peniruan dan pengejekan dari proses kolonial. Selanjutnya lihat Hartono, *Mimikri Pribumi terhadap Kolonialisme Belanda dalam Novel Siti Nurbaya Karya Marah Rusli: Kajian Poskolonial*, (Yogyakarta: Diksi, 2005), vol. 12 No.2.

konstruksi itu merupakan salah satu produk sejarah. Identitas budaya itu sendiri dapat berubah dan diubah tergantung pada konteksnya, kekuasaan, dan *vested interest* yang bermain atau dimainkan. Dengan istilah lain, Eriksen (1993:117) mengatakan bahwa "...identitas itu sifatnya situasional dan bisa berubah."

Melalui kajian hibriditas kritis –konsep hibriditas menunjukkan bahwa setiap proses budaya mengandung percampuran dan interaksi lintas batas– dapat membahas bagaimana lokal-global berinteraksi. Dalam berbagai ekspresi lintas budaya, perebutan kepentingan lokal, nasional, dan global berkontestasi dan terus saling berinteraksi secara dinamis untuk diartikulasikan dalam pendidikan dan kebudayaan. Hal ini tampak pada perkembangan sastra, kesenian, dan tradisi lisan. Tulisan ini mengkaji lebih mendalam bagaimana hibriditas multikultural dan identitas budaya yang lintas batas terefleksi dalam pendidikan dan bagaimana relasi kuasa mewujudkan diri?

B. *Banyuwangi Ethno Carnival* (BEC): Hibriditas dan Ruang Negosiasi Global-Lokal

Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) merupakan ajang promosi budaya dan pariwisata daerah Banyuwangi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. BEC dimaksudkan memberikan warna lain terhadap nilai budaya lokal Banyuwangi dengan mengangkat seni budaya Banyuwangi dalam kemasan kontemporer dan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Banyuwangi. Pada acara BEC 2011 tersebut, para peserta bebas memodifikasi pakaian bertema 3 kesenian yang dominan di Banyuwangi, seperti gandrung, damarwulan, dan kundaran.

Bertolak dari keberhasilan *Jember Fashion Carnival* (JFC)⁵ yang telah berlangsung selama 15 tahun, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggandeng

⁵ JFC (*Jember Fashion Carnival*) ditampilkan di bulan Agustus. Sejak JFC pertama tahun 2001, ritual Agustusan dibalikkan pemaknaannya. Menurut para penggagasnya, mereka ingin mengembalikan makna karnaval kepada selera publik bukan selera negara seperti selama ini terjadi dalam ritual 17 Agustus. "Masyarakat sudah dewasa, tidak perlu lagi diatur-atur oleh negara," kata salah satu panitia JFC. Itulah sebabnya, nama karnaval dalam JFC, dibiarkan seperti aslinya dengan memakai huruf C (*Carnaval*). "Tema dimaksudkan untuk menyerap perkembangan aktual yang terjadi di masyarakat global," kata Dynand Fariz salah satu penggagas JFC. Menurut Fariz, masyarakat bukan lagi masyarakat terkurung dan terisolasi, sulit berinteraksi dengan komunitas lain. Jember adalah cermin multikultur. Apabila anak-anak mudanya. Mereka biasa dengan MTV, berbahasa global (Inggris) dan sangat terbuka dengan dinamika baru. Selanjutnya lihat Farah Abidah, JFC: Pencarian Identitas dan Perlawanan Subkultur dalam Jurnal *SRINTHIL*, Media Perempuan Multikultural, (Depok: Desantara), edisi 11, hlm. 114.

Event Organiser JFC pimpinan Dynand Fariz sebagai konsultan acara selama 3 tahun. Meskipun dibayangi pro dan kontra dari sejumlah kalangan seniman dan budayawan, acara BEC tetap berlangsung pada tanggal 22 Oktober 2011 dengan menampilkan 420 kontestan yang terbagi dalam 3 defile.

Menanggapi sengitnya perlawanan dari sebagian besar kalangan seniman, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas seperti tidak bergeming dengan rancangan BEC. Bahkan, dalam kesempatan membuka acara pentas Padang Ulan, di Pelinggihan Dinas Pariwisata dan Budaya Banyuwangi, 22 Juli 2011, dia menegaskan pilihan tersebut.

“Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para seniman, seniwati, yang sangat saya cintai. Saya ini sangat mencintai kesenian Banyuwangi, seperti tarian yang baru saja dipentaskan. Luar biasa. Kita sangat kaya. Pak Haji Andang dan bapak-bapak budayawan, ke depan kita akan mencari cara dan terobosan untuk terus mengembangkan dan melestarikan kekayaan budaya kita. Pergelaran seperti malam ini harus terus dilaksanakan. Kalau perlu, jangan hanya setiap padang ulan. Kalau perlu dua minggu sekali. Dan, saya juga minta, acara seperti ini jangan diselenggarakan di *Gasebu* terlebih dahulu, karena kondisinya belum begitu layak. Sambil menunggu kelayakannya, saya minta pentas digelar di Pelinggihan. Kalau perlu, biar masyarakat bisa bebas menonton acara seperti ini, pagar dinas dibongkar, biar mereka ndak malu-malu untuk hadir. Saya juga berencana membongkar pagar Pendopo, biar birokrat terkesan terbuka, menerima siapa saja. Selanjutnya, saya berharap jajaran dinas mulai bekerja untuk mendekatkan kesenian dengan pariwisata. Ini perlu dilakukan biar potensi kesenian kita bisa sejalan dan memberdayakan kehidupan pariwisata. Biar pariwisata kita tidak hanya menjual keindahan alam, seperti kawasan Ijen dan Plengkung.

Saudara-saudara yang saya cintai. Saya ingin bercerita.

Beberapa waktu lalu saya dan Pak Yogi (Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata) datang ke Ijen Resort. Di sana saya bertemu dengan para turis dari Perancis. Jadi, saya dan Pak Yogi berada di tengah-tengah bule. Saya bertemu dengan pihak pengelola. Dia bilang ke saya, “kalau kesenian Banyuwangi benar-benar dikelola dan bisa dihadirkan di sini, saya siap mendatangkan turis sebanyak-banyaknya. Bahkan, saya siap memasang *charge* 5 dolar tambahan kepada para turis itu, asalkan mereka disuguhi kesenian Banyuwangi. Tentu, ini merupakan sebuah peluang bagi pengembangan kesenian dan pariwisata kita. Ke depan, sekali lagi, kita tidak hanya menjual keindahan alam, tetapi juga kekayaan seni kita. Terkait hal itu,

terkait pariwisata, kita perlu membuat jaringan internasional, kita perlu menarik perhatian dunia. Maka dari itu, Pak Andang dan saudara-saudara semua, 22 Oktober nanti kita akan menyelenggarakan *Banyuwangi Ethno Carnival*. Saya sengaja menggandeng pengelola *Jember Fashion Carnival*. Kita tahu sebelum ada JFC, Jember siapa yang kenal. Saat ini JFC sudah mempunyai jaringan dengan 180 fotografer seluruh dunia. Hotel-hotel di Jember *full*, sudah di-*booking* semua. Bahkan, Bapak Akbar Tanjung dan Bu Nina yang ingin melihat gemerlap JFC, karena kehabisan hotel di Jember, sampai harus menginap di *Kalibaru Cottage*. Saya akan menemui mereka selepas pertemuan PDIP di Malang. Jaringan ini yang kita butuhkan untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya kita ke dunia. Maka dari itu, saya minta jangan ada lagi perdebatan seputar BEC. Para seniman tradisional jangan khawatir. Kita tidak akan menghilangkan karakter tradisi kita. Sekali lagi kita tidak akan menghilangkan karakter tradisi kita. BEC ini untuk mempromosikan kekayaan budaya kita. Terus, untuk acara yang benar-benar tradisi, kita akan kembali menyelenggarakan Festival Kuwung. Kita tampilkan semua kekayaan tradisi Banyuwangi. Jadi, sekali lagi, kita harus kompak untuk mengembangkan kesenian dan budaya Banyuwangi. Kita harus menunjukkan ke dunia luar bahwa kita masyarakat yang berbudaya. Sejalan dengan keinginan itu, fasilitas pariwisata, seperti hotel harus kita benahi. Kita harus mengupayakan adanya hotel berbintang di Banyuwangi, jangan hanya hotel Melati. Ke depan saya akan membatasi pemberian izin hotel-hotel melati karena hanya digunakan sebagai 'tempat yang tidak baik'. Pembenahan-pembenahan itu harus kita lakukan agar citra masyarakat kita semakin baik."

Dalam sambutannya, Bupati Banyuwangi menyatakan bahwa even karnaval ini digagas untuk menjembatani kesenian tradisional dan modern agar dapat diterima oleh kalangan internasional. Kenyataan tersebut semakin menguat ketika pelaksanaan BEC pada tanggal 22 Oktober 2011. Setelah para tamu undangan menempati tempat duduk masing-masing, MC, seorang laki-laki dan perempuan membuka acara dengan menjelaskan secara ringkas tentang BEC yang merupakan agenda pariwisata berbasis budaya lokal dalam warna kontemporer.

Beberapa saat berselang, Ketua Panitia, yakni Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, memberikan laporan kegiatan. Berikut petikan pidatonya.

"...potensi seni dan budaya Banyuwangi yang melimpah, sampai saat ini belum mampu menarik wisatawan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencoba menampilkan potensi seni budaya

yang dikemas secara modern dalam bentuk *Banyuwangi Ethno Carnival*. Nanti yang ditampilkan adalah konten budaya lokal yang pada tahun ini mengusung tema gandrung, damarwulan, dan kundaran. Ketiga tema ini akan ditampilkan secara kontemporer ala karnaval. BEC melibatkan peserta sejumlah 420, dengan komposisi sebagai berikut. 100 penari gandrung menjadi opening. Selanjutnya akan diikuti 320 peserta BEC yang terdiri atas momen gandrung, 100 peserta, momen damarwulan 120 peserta, dan momen kundaran akan ditampilkan oleh 91 peserta. Mereka ini sebagian besar adalah pelajar SMK dan perguruan tinggi. Selain itu, juga melibatkan sanggar-sanggar kesenian yang di Kabupaten Banyuwangi. Musik yang kita usung adalah musik kolaborasi dari 3 kesenian tersebut. Oleh karena itu, besar harapan kami dukungan masyarakat luas dalam rangkan menyukseskan BEC ini.”

Setelah itu, Bupati Anas memberikan sambutan berikut.

“Yang saya hormati para undangan, khususnya Forum Pimpinan Kabupaten Banyuwangi, Ketua DPRD, Kapolres yang telah bekerja keras mengamankan acara, Pak Dandim yang sudah menjadi tuan rumah yang baik...Dan, yang saya hormati Ketua DPRD dan seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati. Saya mohon berdiri yang saya sebut. Yang saya banggakan sahabat saya Bapak Dr. Zulkifli, Bupati Sumbawa Barat, tepuk tangan, jauh-jauh dari Sumbawa Barat. Pak Mangindar, Bupati Samosir, Sumatra Utara. Bupati tetangga kita Bupati Bondowoso. Mewakili Situbondo, Pak Sekda Situbondo. Hadir juga Asisten Pemerintahan Kota Malang. Dari Ikawangi, Pak Bambang. Dan banyak sekali undangan dari konsulat pemerintah negara-negara sahabat dari Subaraya yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati para seniman budayawan, para kreator, tokoh-tokoh masyarakat, para guru, khususnya yang hadir pada hari ini. Pak Dynand Fariz dari Esmod Model Jakarta, berdiri Pak Dynand Fariz. Atas kreasi, gagasan, dan idenya, hari ini kita akan menikmati hasil proses pendampingan dan berkat dukungan dari mereka semua. Yang saya hormati seluruh mereka yang terlibat, khususnya panitia, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata, dan saudara-saudara semua yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurilah, setelah perdebatan panjang, ya, saya paham di Banyuwangi ini kalau ada sesuatu yang baru pasti ada perdebatan. Ada yang mulai berpandangan optimis, ada yang berpandangan sinis, bahkan ada yang berpandangan seolah-olah kita akan mengikis budaya lokal. BEC kita maksudkan sebagai jembatan antara modernitas dan lokalitas. Harapan kami dengan BEC merupakan jembatan untuk mempromosikan potensi wisata lokal Banyuwangi kepada dunia internasional. Harapan kita, melalui even hari ini, kebudayaan kita ke depan bukan sekedar tontonan, tetapi

juga menghadirkan industri kreatif yang menyejahterakan rakyat. Sejak kemarin telah dilangsungkan pameran UMKR dan telah saya saksikan satu per satu. Dalam rangka BEC ini, mereka telah mampu menjual lebih dari 200 % omset mereka. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh wartawan media cetak dan elektronik serta para fotografer, baik yang profesional maupun setengah profesional yang ada di pojok sana. Karena yang setengah profesional itu gayanya ngalahi yang profesional. Tadi malam juga sudah banyak media dari Jakarta, dari Garuda Indonesia, dari Gatra, MNC, Trans TV, Trans 7, terima kasih atas kehadirannya, mohon dikabarkan dan semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Inilah saya kira yang bisa kami sampaikan. Akhirnya, saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada semuanya, para pengusaha, dan terutama anak-anakku, di mana mereka atas biaya sendiri. Terima kasih kepada mereka semua. Tanpa bantuan pemerintah daerah, mereka berkarya, mengeluarkan inovasi mereka, dengan bimbingan Pak Dynand Fariz dan atas kreativitas dari para pelatih tari lokal yang melatih mereka, bukan hanya gaya, tetapi juga gerak tarinya. Sekarang kalau ditanya apa bedanya JFC dan BEC? BEC menampilkan tidak hanya desain yang mereka buat, tetapi juga menampilkan tarian-tarian lokal berbasis Banyuwangi. Oleh karena itu, terima kasih kepada seluruh anak-anakku, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan sukses. Akhirnya, dengan mengucap bismillahirahmanirahim, dengan memohon ridho dari Alloh SWT, pada hari ini, Sabtu, 22 Oktober 2011, BEC secara resmi saya nyatakan dimulai” (Musik gandrung mengiringi).

Yang menarik dari sambutan Anas adalah wacana yang dimunculkan untuk menanggapi perdebatan pelaksanaan BEC. Ia beargumen bahwa BEC akan menjadi “jembatan” untuk mempertemukan modernitas dan lokalitas. Cara pandang tersebut merupakan bentuk kesadaran hibrid dalam memandang masa lalu-tradisional dan kehidupan modern yang hadir di Banyuwangi secara bersama-sama. Dengan demikian, Anas mengesankan bahwa tidak ada masalah yang harus diperpanjang, karena BEC ia idealisasi sebagai kegiatan yang dapat mempertemukan “yang modern” dan “yang lokal”, sebagaimana yang berlangsung dalam kehidupan kultural sehari-hari masyarakat. Namun, di balik argumen tersebut, Anas memiliki agenda pariwisata, mempromosikan potensi wisata lokal ke dunia internasional. Selain itu, juga untuk menumbuhkan industri kreatif yang diidealisasi mampu menyejahterakan masyarakat. Meskipun tampilan yang disuguhkan tampak menyederhanakan yang tradisional untuk sekedar atraksi *fashion* Anas dan

aparatus birokrasi tidak pernah memperlmasalahkannya. Hal ini mengindikasikan bahwa yang dimunculkan adalah kepentingan komersial —pariwisata dan industri kreatif.

Setelah BEC secara resmi dibuka, pertunjukan dibagi menjadi 5 bagian. Tampilan *pertama* tidak diisi oleh para peraga dari Banyuwangi, tetapi dari JFC. Drumb band JFC dengan penabuh yang mengenakan kostum modifikasi. Dynand Fariz membuka acara dengan diikuti para model JFC yang mengenakan kostum modifikasi gandrung. Sambutan penonton luar biasa meriah, termasuk para tamu undangan. Lupakan semua perdebatan, karena kenyataannya para tamu undangan dan penonton yang berjubel begitu antusias menikmati lenggak-lenggok model yang sebagian besar waria tersebut. Tampilan *kedua*, “gandrung dari masa ke masa”, menampilkan penari gandrung senior, seperti Temu dan Dartik bersama seratus pelajar SMA/SMK yang mengenakan kostum gandrung orisinal dengan beberapa adegan tari sederhana. Tampilan *ketiga*, *fashion show* modifikasi dari kostum Damarwulan yang merupakan kreasi para siswa yang mengikuti pelatihan dan pendampingan oleh JFC. Mereka mengeluarkan biaya sendiri untuk bisa tampil di BEC. Meskipun ada adegan Menakjinggo dan Dhamarwulan, adegan itu hanya tempelan belaka dan tidak lagi memunculkan esensi kesenian tersebut. Tampilan *keempat*, *fashion show* berbasis pakaian gandrung. Tidak ada tarian rancak ala tarian gandrung. Yang ada adalah warna-warni pakaian modifikasi. Tampilan *kelima*, atau penutup adalah modifikasi *fashion* berbasis tari Kandangan dengan kostum dominasi warna hijau.



Gambar 1: Baliho BEC 2011 dan 2015

(Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi)

Di sepanjang rute –dari Lapangan Blambangan dan finis di Depan DPRD– tampak penonton penuh sesak dan antusias. Mereka berdesakan di pinggir jalan untuk menyaksikan acara yang menghabiskan dana sekitar 1 Milyard. Selama BEC berlangsung suasana gembira sangat mendominasi, tidak tampak ketidaksetujuan ataupun perlawanan dari masyarakat. Demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa beberapa hari sebelumnya seakan tenggelam, karena realitas di lapangan membuktikan, bahwa Anas mampu menyuguhkan tontonan yang memuaskan masyarakatnya. Sebagian besar masyarakat Banyuwangi datang untuk menikmati tontonan. BEC mempertontonkan warna berbeda dengan mengolaborasi unsur *fashion show*, seni modern, kontemporer, dan tradisional. Tidak hanya model, peserta pun bervariasi latar belakang, mulai pelajar sampai ibu rumah tangga.⁶ Walaupun ada dari luar Banyuwangi, adalah undangan seperti yang disebutkan Anas dalam sambutannya. Menurut Hasnan Singodimayan, budayawan Banyuwangi, pihaknya sangat mendukung adanya even BEC, karena selain menampilkan wisata asli Banyuwangi dalam bentuk kontemporer, juga memperkenalkan budaya Banyuwangi kepada turis dari beberapa negara. Ironisnya, seratus lebih fotografer dari berbagai negara, ternyata tidak seperti yang dijanjikan. Tidak lebih dari 10 fotografer berkulit bule yang duduk di tenda di tikungan yang memang dibuat khusus untuk mereka.

Pelaksanaan BEC I adalah contoh keberhasilan Bupati Anas dalam membuat kebijakan budaya yang mengangkat potensi budaya etnis Using sebagai aset pariwisata yang diharapkan dapat mengglobal. Meskipun awalnya mendapat perlawanan dari sebagian besar budayawan dan seniman,

⁶ Ardian, 32 tahun, pegawai kesekretariatan di salah satu parpol mengatakan:

“BEC ini tidak mungkin digagalkan, meskipun banyak yang menentang, termasuk para mahasiswa. Lha, itu sudah menjadi program promosi pariwisata, termasuk Dewan juga ndak mungkin membatalkan. Memang, maunya Bupati Anas itu instan, cepat terkenal di mancanegara. Mestinya, ndak perlu meniru JFC sampai-sampai menjadikan mereka konsultan. Tapi, ya, sudah terlanjur. Mestinya, konsepnya diperjelas, diintegrasikan dengan program yang lain. Misalnya, disiapkan paket selama 1 minggu yang memanfaatkan titik-titik kesenian di Banyuwangi. Sehingga, para wisatawan jadi tahu kekayaan budaya Banyuwangi yang sebenarnya. Ataul BEC di-pas-kan dengan musim wisatawan, misalnya April-Juli.”

Elvry Mayluki, 32 tahun, guru SMA Negeri 1 Glagah Banyuwangi, punya pandangan:

“BEC itu tidak perlu dilaksanakan. Ngapain, lha, cuma meniru popularitas JFC dan Batik Solo Carnival. Kalau mau narik wisatawan ndak begitu caranya, itu kan hanya gebyar sesaat, ndak menyentuh persoalan di akar rumput. Apalagi biayanya sangat besar. BEC itu hanya foya-foya. Mendingan anggaran itu dibuat mengentaskan permasalahan kemiskinan.”

BEC tetap berlangsung. Untuk memperkuat dukungan terhadap BEC, Anas menggandeng koran daerah *Radar Banyuwangi* yang secara khusus sudah mem-*blow up* BEC beberapa hari sebelum pelaksanaan. BEC II, tahun 2012 mengangkat tema seni tradisi Barong. BEC III, tahun 2013 mengangkat tema ritual Kebo-keboan. BEC IV, tahun 2014 mengangkat tema ritual Seblang. BEC V tahun 2015 mengangkat tema *The Usingnese Royal Wedding*. Dan BEC VI 2016 mengangkat tema Sritanjung Sidopekso yang merupakan legenda asal nama kota Banyuwangi.

Grup-grup seni yang belum tampil sebagai tema BEC ditampilkan dengan wadah Festival Kuwung yang publikasinya sampai pada tataran nasional dan global. Hal tersebut mengundang masyarakat yang menaruh perhatian terhadap budaya Banyuwangi untuk menyaksikan Festival Kuwung yang semula bernama Pelangi Budaya. Penggunaan istilah *kuwung* yang berarti 'pelangi' diambil dari bahasa Using. Istilah tersebut tentu lebih membumi dibandingkan dengan Pelangi Budaya. Festival Kuwung diselenggarakan untuk mengakomodasi keluhan masyarakat khususnya para seniman dan budayawan Banyuwangi yang mengkhawatirkan terabaikannya seni tradisi.

Untuk meraih dukungan publik Banyuwangi, beberapa baliho besar di pasang di titik-titik strategis. Selain itu, beberapa spanduk jalan di pasang. Di kantor dinas juga dipasang spanduk yang intinya, mengucapkan "Selamat dan Sukses atas Penyelenggaraan BEC." Yang menarik adalah di kantor NU Banyuwangi juga dipasang baliho besar yang menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan BEC. Dari informasi beberapa wartawan media lokal dan nasional, mereka memang menyatakan bahwa tidak ada riak-riak perlawanan dari tokoh agama, khususnya dari NU, terhadap pelaksanaan BEC. Hal itu senada dengan pernyataan Lang Lang Sitegar, pegiat seni dan budaya Banyuwangi, "para kiai diam semua, tidak ada yang bersuara." Mungkin, ada saja kiai atau tokoh agama yang bersikap tidak setuju dengan pelaksanaan BEC, tetapi tidak muncul ke permukaan.

Dengan memberikan kesempatan bagi sajian tradisional, pemerintah kabupaten sebenarnya mampu menaklukkan *kekekehan* hati para seniman. Pihak Pemerintah Kabupaten rupanya sangat sadar dengan prinsip artikulasi-negosiasi untuk memperkuat hegemoni melalui aparatus hegemonik kultural. Kenyataannya politik identitas tetap didominasi oleh rezim negara.

Selama empat tahun terakhir, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menerapkan pendekatan sistemik. Bupati melihat even budaya yang ada di Banyuwangi cukup banyak dan beragam. Semuanya masih sebagai serpihan-serpihan berlangsung di wilayah masyarakat pendukungnya. Semua itu dilihat

sebagai peluang yang dapat ditawarkan sebagai destinasi wisata budaya. Oleh karena itu, sejak tahun 2013 aneka even budaya tersebut disatukan dalam agenda *Banyuwangi Festival* dan dipublikasikan melalui WEB Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, agar dapat diakses oleh masyarakat global. Sebagian kegiatan budaya diselenggarakan di pusat kota Banyuwangi dan sebagian lainnya di tempat asal kegiatan budaya tersebut. Pendekatan tersebut berhasil meningkatkan jumlah tamu secara signifikan pada masing-masing even budaya. Tahun 2016 ini *Banyuwangi Festival* mengagendakan 53 kegiatan.



Gambar 2: Agenda Banyuwangi Festival 2013–2016
(Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi)

C. Menakjingo: Resistensi dan Negosiasi Budaya

Mengandaikan *Jinggoan* sebagai suatu tanda dalam kebudayaan Using, tentu berkaitan dengan representasi identitas. Dengan kata lain, pertunjukan *Jinggoan* dapat menjadi tanda akan adanya identitas. Barbara Ward membuat empat kategori identitas: *Immediate model* adalah model yang merupakan sistem sosial budaya yang dibangun oleh komunitas masyarakat pemilik identitas; *Ideological model* dibangun dari anggapan orang tentang sistem-sistem yang tradisional; dan *observer model* yang berbentuk konstruksi. Model ini dibedakan atas kelompok etnik pembuat model, yaitu mereka yang berasal dari dalam kelompok etnik termaksud dan mereka yang berasal dari luar (Shahab, 1994; Kleden, 2000). Didorong oleh kesadaran dan kebutuhan identitas yang dipandang sebagai bentuk semangat kedaerahan, penguasa daerah setempat melalui budayawan Using, Hasan Ali, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemda Dati II Banyuwangi sekitar paruh kedua tahun 1970-an mengubah cerita Damarwulan-Menakjingo yang dipandang sangat merugikan masyarakat Using.

Pertunjukan *Jinggoan* tidak lagi menampilkan tokoh Menakjingo sebagai pemberontak, penindas rakyat, bertubuh cacat, berwajah bopeng,

diperburuk lagi dengan kedua istrinya, Wahita dan Puyengan yang tidak setia, dan tewas dengan kepala terpenggal seperti versi *Ketoprak Mataram*, melainkan ia ditampilkan sebagai pahlawan, fisiknya tidak lagi digambarkan jelek seperti sebelumnya, kepala tidak terpenggal, dan memedulikan nasib rakyatnya. Seakan telah menjalani operasi plastik, Menakjinggo berubah menjadi tampan. Dia dilukiskan sebagai raja bijaksana, dicintai rakyatnya, dan menentang kelaliman Majapahit yang menghisap rakyat Banyuwangi. Sebaliknya Damarwulan digambarkan sebagai tokoh yang merusak pagar ayu (rumah tangga) orang. Perang tanding Menakjinggo-Damarwulan tidak berakhir dengan kematian Menakjinggo, melainkan Menakjinggo mendapat penghormatan dewata dalam mencapai kesempurnaan hidup. Rekayasa Hasan Ali yang didukung pemerintah setempat dalam menyikapi cerita tersebut didukung oleh sebagian besar masyarakat Using. Namun, untuk masyarakat etnis Jawa (wong kulon) seperti di daerah Banyuwangi Selatan versi baru seakan tidak berpengaruh sama sekali. Mereka tetap saja berpatokan bahwa pakem prototipe Menakjinggo adalah buruk rupa, pemberontak, dan istrinya suka menyeleweng. Dengan perlahan, proses perubahan versi baru pertunjukan Damarwulan-Menakjinggo berlangsung sangat efektif. Tokoh simbolik Menakjinggo menjadi prototipe yang tidak lagi antagonis. Perubahan yang memperoleh respons positif ini tidak lagi berada dalam arena kontroversi, melainkan yang lebih penting merupakan representasi simbolik bahwa Using berbeda dengan Jawa Kulon.

Menakjinggo oleh masyarakat Using ditempatkan sebagai seorang ksatria, pemimpin, pahlawan, dan tokoh kebanggaan mereka. Akan tetapi dalam jangka waktu yang lama masyarakat Using tidak mampu melakukan perlawanan. Ketika tokoh Menakjinggo yang ditampilkan dalam seni kethoprak atau Janger dipandang sebagai hiburan tentu tidak menimbulkan persoalan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Purwadi (dalam wawancara dengan penulis, Agustus 2014) berikut.

Kalau ada rekonstruksi itu setuju sekali karena untuk mengubah *image* yang menggambarkan Menakjinggo sebagai tokoh yang jelek, baik postur tubuhnya, wajahnya, suaranya, maupun sifatnya. Padahal sebetulnya tidak demikian. Menakjinggo adalah seorang ksatria, tinggi besar, gagah berani, dan merupakan tokoh yang menjadi ikon dalam cerita itu dan sekaligus sebagai pahlawan Blambangan/Banyuwangi.

Kalaupun pada kenyataannya Menakjinggo digambarkan sebagai tokoh yang jelek, bagi masyarakat Using Banyuwangi, itu hanya sebagai pertunjukan, sebagai tontonan untuk menyenangkan penonton, dan dalam pertunjukan pasti terjadi pelaku yang protagonis dan antagonis dan ini diwujudkan dalam peperangan. Jika tidak ada tokoh yang antagonis dan protagonis seandainya ada perang menjadi tidak ramai sehingga penonton tidak berminat untuk menontonnya. Hal ini adalah menjadi hak mereka. Namun sebagai orang Using Banyuwangi tidak terima jika tokoh Menakjinggo dijelek-jelekan.

Pandangan tersebut menempatkan karakter Menakjinggo sebagai seni pertunjukan dan sebagai pahlawan Using. Hal tersebut menunjukkan daya kritis masyarakat Using dalam menyikapi gejala tersebut. Kemungkinan lainnya adalah karena masyarakat Using tidak mampu dan tidak berani melakukan perlawanan budaya. Menakjinggo sebagai tokoh dalam seni tersebut memiliki kemungkinan dimaknai sebagai representasi keberadaan masyarakat Using. Jika itu yang terjadi, mereka tentu mulai terusik kenyamanannya. Mereka cenderung tidak bisa menerima kalau pahlawan mereka ditampilkan jelek dan sebagai antagonis.

Narasi dengan versi baru mengekspresikan kemampuan masyarakat Banyuwangi, khususnya komunitas Using “berbicara” tentang keseniannya. Mereka mereinterpretasi dan mereformulasi “wajah” tokoh representasi diri mereka yang dilukis orang lain sesuai dengan kehendak politiknya. Sebuah lukisan yang bukan saja menggambarkan “wajah” bopeng, tetapi juga sempat mengantarkan komunitas Using merasa rendah diri di tengah pergaulan makro dengan komunitas-komunitas lain. Komunitas Using, seperti yang disaksikan selama ini, adalah sekelompok warga bangsa selama ratusan tahun terpinggirkan.

Tampaknya penegasan identitas Using di tengah pergumulan makro apa pun, merupakan sebuah keniscayaan bagi komunitas ini. Komunitas ini mesti bersabar di tengah himpitan berbagai konstruk yang dibangun orang lain yang umumnya penuh nada sinisme. Mereka tetap menyikapi, menyasati, dan melakukan negosiasi budaya dengan kekuatan-kekuatan yang hadir dan menghimpitnya. Dalam proses ini, komunitas Using harus mereinterpretasi dan meredefinisikan diri secara kontekstual.

D. Simpulan

Kajian relasi kuasa seperti dua peristiwa budaya di atas memperlihatkan ekspresi lintas budaya dan hubungan asimetris dari kekuatan politik. Identitas budaya yang lintas batas terefleksi melalui modifikasi seni, bahasa dan konstruksi. Sebuah identitas merupakan sebuah proses yang berakhir terbuka. Sangat terkait dengan proses internalisasi nilai, norma, tujuan, dan gagasan. Proses atribut kultural merupakan proses konstruksi yang dinamis. Kekuasaan cenderung menyebar dan tak satu pun konstruksi dibangun yang tidak berdasarkan atau melalui proses politik, baik untuk kepentingan legitimasi atau mempertahankan kekuasaan sebuah rezim tertentu maupun untuk melawan konstruk rezim politik yang sedang berkuasa.

Keterbukaan dalam menerima multikulturalitas atau kebhinnekaan dapat membuka ruang-ruang pemahaman identitas budaya yang majemuk. Sebagai sebuah produk, budaya hibrid merupakan bentuk perpaduan dan harmonisasi yang diciptakan melalui kebijakan pemerintah dalam mempertemukan modernitas dan lokalitas dalam ruang negosiasi yang terus-menerus.

Daftar Pustaka

- Abidah, Farah. 2007. "JFC: Pencarian Identitas dan Perlawanan Subkultur." Dalam Jurnal *SRINTHIL*, Media Perempuan Multikultural. Depok: Desantara. edisi 11, hlm.114.
- Barker, Chris. 2000. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: Sage Publications.
- Bhabha, Homi K. 1994. *The Location of Culture*. London and New York: Routledge.
- Budianta, Melani. 2008. "Aspek Lintas Budaya dalam Wacana Multikultural." Dalam *Kajian Wacana: dalam Konteks Multikultural dan Multidisiplin*. Jakarta: FIB UI.
- Budiman, Hikmat. 2005. "Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas." Dalam *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Tifa.
- Eriksen, Thomas Hylland. 1993. *Etnicity & Nationalism: Anthropological Perspectives*. London and Boulder, Colorado: Pluto Press.
- Hall, Stuart. 1993. "Cultural Identity and Diaspora." Dalam Patrick Williams and Laura Chrisman (eds). *Colonial Discourse and Postcolonial Theory*. New York: Harvester/Wheatsheaf.

- Farid, Hilmar. 1994. Menemukan Bangsa, Mencipta Bahasa: Bahasa, Politik, dan Nasionalisme Indonesia." Dalam *Kalam*. Edisi 3.
- Hartono. 2005. "Mimikri Pribumi terhadap Kolonialisme Belanda dalam Novel Siti Nurbaya Karya Marah Rusli: Kajian Poskolonial." Dalam *Jurnal Diksi*. vol. 12 No.2. Yogyakarta.
- Kahn, Joel S. 1995. *Culture, Multiculture, Postculture*. London, Thousand Oaks and New Delhi: SAGE Publication.
- Kleden, Ninuk. 2000. *Pendefinisian Kembali Tradisi dan Identitas Etnik*. Jakarta: PMB LIPI.
- Loomba, Ania. 2003. *Kolonialisme/Pascakolonialisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suparlan, Parsudi. 2008. "Multikulturalisme sebagai Modal Dasar Bagi Aktualisasi Kesejahteraan Rakyat Indonesia." Dalam *Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural*, Jakarta: YPKIK.
- Sutrisno, Mudji. 2004. "Menafsir Keindonesiaan." Dalam *Hermeneutika Pascakolonial*.